



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 1703–1709

Studi Perbandingan Kebijakan Manajemen Bencana di Negara Negara ASEAN

Via Oktaviani, Eli Apud Saepudin, Siti Lita Rosita, Shifa Fadilah, Adi
Ardiansyah

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Bina Bangsa

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2738>

How to Cite this Article

APA : Oktaviani, V. ., Saepudin, E. A., Rosita, S. L. ., Fadilah, S., & Ardiansyah, A. (2024). Studi Perbandingan Kebijakan Manajemen Bencana di Negara Negara ASEAN. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1703 – 1709.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2738>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Studi Perbandingan Kebijakan Manajemen Bencana di Negara Negara ASEAN

Via Oktaviani¹, Eli Apud Saepudin², Siti Lita Rosita³, Shifa Fadilah⁴, Adi Ardiansyah⁵
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa^{1,2,3,4,5}

Email:

viaoktavianyxxx@gmail.com¹, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², litarosita090@gmail.com³,
shifafadilah88@gmail.com⁴, adi.ardiansyah148@gmail.com⁵

Diterima: 24-12-2024

| Disetujui: 25-12-2024

| Diterbitkan: 26-12-2024

ABSTRACT

This study aims to compare disaster management policies in ASEAN countries. ASEAN COUNTRIES. Through a comparative analysis of legal frameworks, institutions and on-the-ground practices, this study reveals the diversity of approaches to disaster management in ASEAN countries. practices on the ground, this study reveals the diversity of approaches adopted by each country in dealing with disaster risk. applied by each country in dealing with disaster risks. The results show that while there are similarities in the basic principles of disaster management, there are significant differences in terms of the emphasis on principles of disaster management, there are significant differences in terms of the emphasis on the mitigation, preparedness and emergency response stages. This study highlights the importance of considering local context and institutional capacity in formulating effective policies. formulating effective policies.

Keywords: ASEAN, Disaster, Policy, Management, Comparison.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan manajemen bencana di negara-negara ASEAN Melalui analisis komparatif terhadap kerangka hukum, lembaga, dan praktik di lapangan, penelitian ini mengungkap keragaman pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing negara dalam menghadapi risiko bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar manajemen bencana, terdapat perbedaan signifikan dalam hal penekanan pada tahap mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons darurat. Studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan kapasitas institusional dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Kata kunci : ASEAN, Bencana, Kebijakan, Manajemen, Perbandingan.

PENDAHULUAN

Negara-negara ASEAN, dengan keragaman geografis dan ekonominya, secara historis rentan terhadap berbagai bencana alam. Seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan badai tropis. Peningkatan dan intensitas bencana dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan banyak kematian pada kerentanan yang sama, negara-negara ASEAN telah mengembangkan pedoman manajemen bencana yang berbeda. Meningkatnya intensitas bencana memaksa negara-negara ASEAN untuk meningkatkan upaya dalam penanggulangan bencana. Namun efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut berbeda-beda, sehingga studi komparatif ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN, dengan fokus pada pendekatan multi-bahaya, kerangka pengelolaan, dan kekuatan manusia. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengidentifikasi praktik-praktik yang baik, menyoroti tantangan-tantangan yang ada di depan, dan membuat rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas komunitas ASEAN terhadap kecelakaan.

ASEAN telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperkuat kerja sama regional dalam penanggulangan bencana. Beberapa proyek telah dimulai, termasuk pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center). Meskipun demikian, masih ada ruang untuk kerja sama politik dan koordinasi antar negara anggota. Studi komparatif ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kebijakan penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN dalam kaitannya dengan kerangka regional, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk memperkuat kerja sama di masa depan. Efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Studi ini membandingkan kerangka kelembagaan penanggulangan bencana di negara-negara ASEAN, termasuk peran dan tanggung jawab lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kapasitas sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana.

Konsep manajemen bencana berkaitan erat dengan manajemen krisis atau manajemen darurat. Pengertian manajemen bencana yaitu serangkaian fungsi perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan (persiapan, pencegahan, respon dan pemulihan) saat bencana (Brown, 2018). Manajemen bencana dimaknai sebagai proses terencana yang melewati berbagai tahapan antara lain tahap Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana (Mahardika & Larasati, 2018) Strategi manajemen bencana perlu mempertimbangkan berbagai aspek, yang berkaitan dengan bencana maupun aspek sosial termasuk politik. Manajemen strategis dan komprehensif dapat mendukung keberhasilan manajemen bencana (Nojavan, Salehi & Omidvar, 2018)(Kadun MT, 2023)

Masyarakat lokal dengan ancaman bencana bukanlah pihak yang tidak berdaya, apabila agenda pengurangan risiko bencana bukan lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan (Anonim, 2012, hal. 18). Namun seringkali pemerintah cenderung menerapkan pendekatan "atas ke bawah (top-down)" dalam perencanaan manajemen bencana di mana kelompok sasaran diberi solusi yang dirancang untuk mereka oleh para perencana dan bukannya dipilih oleh masyarakat sendiri. Pendekatan seperti itu cenderung mendekatkan tindakan-tindakan manajemen bencana ôsik dibandingkan perubahan-perubahan sosial untuk membangun sumber daya dari kelompok yang rentan (Handayani, 2011).(JASMINE, 2014)

Secara umum, sistem penanggulangan bencana merupakan suatu kerangka konseptual yang saling terintegrasi dengan beberapa aspek, yaitu: kerangka legislasi (regulation), perencanaan (planning), kelembagaan (institutional), pendanaan (budgeting), pengembangan kapasitas (capacity building) dan

penyelenggaraan penanggulangan bencana (disaster management implementation) (Maarif, 2012). Sistem penanggulangan bencana yang tertuang dalam dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Penanggulangan Bencana sudah sepatutnya diterapkan diseluruh wilayah Indonesia mengingat Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana (Kristian, 2018). Walaupun sistem penanggulangan bencana secara nasional tersebut telah disusun pada dalam kerangka konseptual, namun implementasi sistem penanggulangan bencana juga sangat bersifat lokalitas.(Shalih & Nugroho, 2021).

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah ini dibuat menggunakan studi literatur yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap literatur yang relevan, seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara-negara ASEAN menunjukkan keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang luar biasa. Keberagaman ini tentu saja juga mempengaruhi tindakan-tindakan berbeda yang diterapkan dalam penanggulangan bencana. Namun di balik perbedaan tersebut terdapat pula persamaan yang menjadi dasar kerja sama regional dalam menghadapi bencana yang akan datang. Perbandingan Kesamaan dan Perbedaan Kebijakan Manajemen Bencana Antar Negara ASEAN. Sistem Perbandingan Penanggulangan Bencana ASEAN adalah kerangka kerja untuk menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan praktik penanggulangan bencana yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, keberhasilan dan tantangan dalam upaya penanggulangan bencana di kawasan ASEAN.

➤ Kesamaan Kebijakan Manajemen Bencana di ASEAN

Meskipun setiap negara anggota ASEAN memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda, namun terdapat beberapa kesamaan dalam kebijakan manajemen bencana yang mereka miliki. Hal ini didorong oleh adanya kesadaran bersama akan kerentanan kawasan terhadap bencana alam dan pentingnya kerja sama regional. Beberapa kesamaan tersebut antara lain:

- Pengembangan kerangka hukum dan kebijakan: Semua negara ASEAN telah mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan nasional terkait manajemen bencana. Kerangka ini mencakup aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
- Pembentukan badan atau lembaga khusus: Hampir semua negara ASEAN memiliki badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan manajemen bencana.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Negara-negara ASEAN secara aktif melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen bencana melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.
- Kerjasama regional: ASEAN telah membentuk berbagai mekanisme kerjasama regional untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya dalam rangka meningkatkan kapasitas manajemen bencana di kawasan. Contohnya adalah ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER).

➤ Perbedaan Kebijakan Manajemen Bencana di ASEAN :

Perbedaan kebijakan manajemen bencana antar negara ASEAN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Karakteristik bencana: Jenis dan frekuensi bencana yang terjadi di setiap negara berbeda-beda. Misalnya, Indonesia lebih sering mengalami gempa bumi dan tsunami, sedangkan Filipina lebih sering mengalami topan.
- Kondisi geografis: Kondisi geografis yang berbeda-beda mempengaruhi kerentanan suatu negara terhadap bencana. Negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina lebih rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, sedangkan negara-negara daratan seperti Thailand dan Kamboja lebih rentan terhadap banjir.
- Kondisi sosial ekonomi: Tingkat pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara mempengaruhi kapasitasnya dalam menghadapi bencana. Negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam manajemen bencana.
- Sistem pemerintahan: Sistem pemerintahan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan koordinasi dalam manajemen bencana.
- Sumber daya: Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang berbeda-beda juga mempengaruhi kemampuan suatu negara dalam melaksanakan kegiatan manajemen bencana.

➤ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Kebijakan Manajemen Bencana :

- Kapasitas institusi: Kekuatan, kelemahan, dan kapasitas institusi yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.
- Partisipasi masyarakat: Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan manajemen bencana sangat penting. Masyarakat yang aktif terlibat akan lebih siap menghadapi bencana.
- Kerjasama antar sektor: Kerjasama yang efektif antar sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam manajemen bencana.
- Teknologi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen bencana dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan data, analisis risiko, dan koordinasi.
- Pembiayaan: Ketersediaan anggaran yang cukup untuk kegiatan manajemen bencana sangat penting.

Bencana alam mempunyai banyak tahapannya yaitu, Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana terdapat berbagai upaya yaitu:

a. Pencegahan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

b. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan ¼ sik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).

c. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Kesiapsiagaan adalah sekumpulan tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat

dan perorangan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif. Bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bencana tersebut dapat berupa:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- d. Penyiapan lokasi evakuasi.
- e. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. (Fatmawati & Syahbana, 2015)

Negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, Singapura, Myanmar, Brunei, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste menghadapi berbagai jenis bencana alam. Walaupun masing-masing negara memiliki pendekatan unik dalam pengelolaan bencana, ada titik temu yang signifikan dalam kolaborasi regional untuk mitigasi risiko.

Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) : Indonesia menerapkan model kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, NGOs, dan masyarakat. Program ini memprioritaskan penggunaan dana desa untuk infrastruktur mitigasi dan pelatihan masyarakat. Selanjutnya Implementasi, Contohnya di Jawa Barat, program PRBBK berhasil meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan merealisasikan proyek-proyek mitigasi seperti pembangunan bendungan dan fasilitas evakuasi. Pentahelix Model : Malaysia menggunakan model pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Festival Tangguh di Bogor menjadi contoh konkret kolaborasi ini, yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya siaga bencana.

Ang (2007) menggunakan data deret waktu tahunan untuk periode 1960-2005 untuk menganalisis determinan investasi asing di Malaysia. Temuan menunjukkan pengaruh GDP riil terhadap investasi asing bertanda positif dan signifikan sedangkan hubungan antara tingkat pertumbuhan GDP dan investasi asing bertanda positif dan tidak signifikan. Apalagi ada beberapa faktor lain yang mendorong investasi asing ke Malaysia seperti tingkat perkembangan keuangan, infrastruktur pembangunan, dan keterbukaan perdagangan. Akhirnya, tarif pajak badan hukum yang lebih tinggi dan apresiasi nilai tukar riil memiliki dampak negatif dan mengurangi arus masuk investasi asing ke Malaysia. Hasil penelitian Won et al. (2008) untuk Asia negara industri baru juga menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk ditentukan dengan cepat oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara ini. Secara teoritis, investasi asing secara luas diyakini paling penting peningkatan pertumbuhan ekonomi (Hansen & Rand, 2006) karena membawa modal, teknologi dan pengetahuan ke dalam tuan rumah negara. Investasi asing diharapkan untuk meningkatkan stok pengetahuan yang ada dengan mentransfer pengetahuan (Karimi, et al. 2009) ke negara tuan rumah melalui pelatihan tenaga kerja, transfer keterampilan, dan transfer manajerial dan praktek organisasi. Investasi asing dapat mempromosikan pemanfaatan teknologi yang lebih maju di perusahaan lokal melalui akumulasi modal di negara tuan rumah (Barba dan Venables, 2004). (Kurniasih, 2020)

Dengan implementasinya lebih spesifik lagi, Malaysia juga mengembangkan aplikasi mobile untuk informasi bencana yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif. Kerjasama Internasional, Filipina fokus pada kerjasama internasional

untuk meningkatkan kemampuan lokal dalam menghadapi bencana. Teknologi modern seperti drone dan satelit digunakan untuk monitoring dan prediktif bencana. Filipina bekerja sama dengan organisasi internasional seperti ASEAN Disaster Management Center (ADMC) untuk mengembangkan sistem early warning system yang lebih akurat dan efektif. Singapura menggunakan inovasi digital untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mitigasi bencana. Pelatihan online dan simulasi bencana digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Singapura juga mengembangkan platform digital untuk berbagi informasi dan sumber daya antaragenesis, mempermudah koordinasi dan respon bencana.

Negara Indonesia adalah negara dengan keberagaman nya, namun Indonesia pun banyak sekali bencana alam, pasca bencana pemerintah Indonesia fokus untuk membangun segala kerusakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembangunan di wilayah-wilayah bencana pada berbagai bidang kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur perumahan, dan pemerintahan. Peristiwa tersebut juga membuat berbagai negara bersimpati untuk memberikan bantuan dalam memulihkan keadaan pasca bencana baik dari pemerintah negara lain maupun dari lembaga swasta seperti lembaga swadaya masyarakat (non-government organisations/NGO). Lembaga Swadaya 12M. Elfan Kaukab. Peran NGO Internasional dalam Pembangunan Pasca Bencana di Indonesia. Masyarakat (LSM) atau NGO merupakan organisasi yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, memperhatikan kepentingan orang miskin, melindungi dan menjaga lingkungan, menyediakan layanan dasar sosial dan melakukan pengembangan masyarakat (Cleary, 1997), yang memiliki 3 unsur: pelaksana, katalisator dan mitra (Lewis, 2007)(Kindangen et al., 2021)

NGO merupakan lembaga independen yang tidak dijalankan oleh pemerintah dan bukan bekerja atas dasar profit. Scholte (2004) menyatakan bahwa LSM dibedakan sesuai dengan fokus. pekerjaan mereka, sementara beberapa dikelompokkan menurut tingkat operasi. Beberapa NGO diorganisir seputar isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan dan berbeda tergantung pada misi, visi, tujuan, dan mandat mereka (Stoddard, 2006). NGO sebagai salah satu organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela juga memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. sebagai fasilitator dan katalisator;
2. sebagai pelatih dan pendidik;
3. sebagai pemupukan modal;
4. penyelenggarakan proyek-proyek stimulant;
5. sebagai agent advokasi; serta
6. sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat

Selain keterlibatan LSM sebagai salah satu stakeholder, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting yang menjadi faktor keberhasilan program tersebut (Pratama, 2015). LSM melakukan kegiatan pemberdayaan dengan latar belakang sosial-ekonomi dalam meningkatkan kemandirian dan partisipasi pembangunan (Nano, 2008).(Kindangen et al., 2021).

KESIMPULAN

Meskipun terdapat perbedaan dalam kebijakan manajemen bencana antar negara ASEAN, namun secara umum terdapat kesamaan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat unik bagi masing-masing negara. Untuk meningkatkan efektivitas manajemen bencana di kawasan ASEAN, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kerjasama regional, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta meningkatkan kapasitas institusi dan masyarakat.

Berdasarkan studi perbandingan kebijakan manajemen bencana di negara-negara ASEAN, dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap negara memiliki tantangan dan kekhususan masing-masing, sebagian besar negara ASEAN telah mengembangkan kebijakan dan struktur kelembagaan yang solid untuk penanggulangan bencana. Namun, masih banyak tantangan terkait dengan kapasitas sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kebijakan manajemen bencana yang efektif di ASEAN harus melibatkan peningkatan sistem peringatan dini, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan mitigasi. Selain itu, kerjasama antar negara ASEAN dalam berbagi informasi dan pengalaman juga sangat penting untuk menghadapi bencana lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, S., & Syahbana, J. A. (2015). Penerapan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Lingkungan Kampus (Studi Perbandingan Antara Kampus Tembalang Universitas Diponegoro dan Kampus Tertre Universitas Nantes). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(4), 484. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i4.17599>
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 18(02), 133–150.
- Kadun MT, A. D. N. (2023). Perbandingan Komunikasi Bencana Media Sosial Pemerintah Dan Masyarakat. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 328–339. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5051>
- Kindangen, I. N., Lasut, R., & Karisoh, F. J. M. M. (2021). Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Lex Privatum*, IX(13), 184–194.
- Kurniasih, E. P. (2020). *Perkembangan investasi asing di negara ASEAN. In Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*. 362–370.
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala*, 15(2), 124–138. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.379>